

# PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN

Zubaedi  
STAIN Bengkulu

## Abstract

The multicultural education concept is an alternative solution to reducing racial antagonisms in our country. Multicultural education is education that values cultural pluralism or an education model that aims to promote the transformation of the educational process to reflect the ideals of democracy in a pluralistic society and structural equality within a larger society. This concept affirms that schools should be oriented toward the cultural enrichment of all children and recognize cultural diversity as reality in Indonesia that should be preserved and extended. Thus, one of its important goals is to help all students to acquire knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate, and communicate with people from diverse groups in order to create a civic and moral community that works for the common good. There are three essential goals of multicultural education. The first is to enhance sensitivity to and understanding of others, including cultural groups in Indonesia and other nations. The second is to enhance the ability to make decisions and take effective actions based on a multicultural analysis and synthesis. The third is to enhance understanding of the process of stereotyping, a low degree of stereotypical thinking, and pride in self and respect for other people.

Keywords: multicultural education, education for freedom, intolerable

## A. Pendahuluan

Sebagian ahli sosial beranggapan bahwa gagasan pendidikan multikultural merupakan sebuah solusi yang dianggap tepat dalam menciptakan kerukunan atau harmonisasi di antara elemen bangsa yang beragam (Gay, 1994: 2). Ketika kehidupan berbangsa dan bernegara belum steril dari berbagai konflik sosial seperti sekarang, pendidikan multikultural menjadi salah satu bahan perbincangan yang cukup penting.

Megawati ketika menjabat presiden pernah menginstruksikan Departemen Agama untuk mengembangkan pola pendidikan agama yang berwawasan multikultural (Ali, 2002:4). Sayangnya, himbauan itu belum mendapat tanggapan secara sungguh-sungguh. Wacana pendidikan multikulturalisme memang sempat menghangat di media massa dan menjadi bahan diskusi di sejumlah forum, hanya dalam perkembangannya tidak diikuti dengan sejumlah upaya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk memformulasikannya ke

dalam gagasan yang lebih membumi. Bahkan, dapat dikatakan, upaya mempromosikan konsep pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik horisontal maupun vertikal bangsa akibat salah paham soal SARA (suku, agama, ras, antargolongan) belum berjalan secara memadai. Sebaliknya, para elit politik, elit agama, atau pakar ilmu sosial dalam menganalisa akar persoalan konflik cenderung menjadikan kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai kambing hitam. Amat sedikit yang mau mengakui kalau persoalan konflik dan kekerasan itu berkait erat dengan praktik pengajaran (pendidikan) agama dan moral yang belum memupuk kerukunan bersama.

Sebagai implikasinya, upaya memperlunak kebekuan dan mencairkan kekakuan pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dari masing-masing agama dan budaya belum dianggap terlalu penting untuk diarahkan ke ranah pendidikan. Mulai dari segi materi sampai metodologi yang diajarkan di sekolah, pesantren, seminari, dan masyarakat umumnya memiliki kecenderungan untuk mengajarkan pendidikan agama secara parsial (kulitnya saja). Materi pendidikan agama, misalnya, lebih terfokus pada mengurus masalah *private affairs* (*al ahwal al syakhshiah*), semacam masalah keyakinan seorang hamba dengan Tuhannya *face to face*. Seakan masalah surga atau kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan ibadah atau akidah saja. Sebaliknya, pendidikan keagamaan kurang peduli dengan isu-isu umum semacam sikap antikorupsi, wajibnya transformasi sosial, dan kepedulian terhadap sesama (Busman, 2003:4).

Fenomena di atas, tentu saja patut disesalkan. Pasalnya, saat ini konsep

pendidikan multikulturalisme yang berintikan penekanan upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lain di kalangan peserta didik sangat dibutuhkan. Alasannya, kondisi-situasi bangsa saat ini belum benar-benar steril dari ancaman konflik etnis dan agama, radikalisme agama, separatisme, dan disintegrasi bangsa. Bahkan, dapat dikatakan, serangkaian kerusakan yang memakan ribuan korban tewas seperti kasus Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997), Ambon dan Maluku sejak 1999, sampai Sampit, Kalimantan Timur (2000) sewaktu-waktu bisa meledak jika tanpa langkah antisipatif secara dini. Untuk itu, menghadirkan konsep pendidikan multikultural merupakan bagian dari usaha komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi konflik bernuansa SARA.

## B. Pembahasan

### 1. Esensi Pendidikan Multikulturalisme

Uraian sebelumnya telah mempertebal keyakinan bersama betapa paradigma pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara beragamnya etnik, ras, agama, budaya, serta kebutuhan di antara kita. Paparan di atas, juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan yang lain. Diharapkan, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, dapat membantu siswa mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, dan kepribadiannya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme

di sekolah-sekolah, akan menjadi salah satu medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didesiminasikan melalui lembaga pendidikan. Jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu perhatian utama dari Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal itu, dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Soekarnoputri, 8 Juli 2003:9).

Pada konteks ini, dapat dikatakan, tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan (*l'intorelable*), seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sahtidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, serta hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Penanaman sikap toleransi dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan serta latar belakang sosial-budaya berbeda-beda sebagaimana ditekankan dalam pendidik-

an multikultural tampaknya sejalan dengan ajaran dan nilai etis Al-quran. Hal ini antara lain dapat kita simak dalam Al-quran Surat al-Hujurat ayat 13, yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertawa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (R.H. A. Soenarjo, 1971: 94).

Surat lain menegaskan bahwa perbedaan pandangan hidup dan keyakinan hendaknya menjadi penyemangat untuk saling berlomba menuju kebaikan. Kelak di akhirat, Allah yang akan menerangkan mengapa dirinya berkehendak seperti itu dan keputusan yang paling adil di tangan-Nya (Q. S. al-Maidah: 48). Pemahaman yang didasarkan kesadaran kemajemukan secara sosial, budaya dan, agama telah menjadi dasar dalam membangun gagasan pendidikan multikulturalisme.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada kepentingan politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial Orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-

lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an (Gorski, 2003: 1).

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras serta rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah, menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an (Cameron, 1994). Selama dua dekade, konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai salah satu strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi, serta masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik sehingga mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara (Chirzin, 26 Juli 1995:4).

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya, seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistic (Watkins, 1994).

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hampasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa Indonesia, namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan perlu kita menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut (Semiawan, 2003: 10).

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam

menjalankan peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik. Selain itu, juga diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragama agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama (Banks, 1997: xi).

Menurut Banks, tujuan pendidikan multikultural dirumuskan sebagai berikut.

*"The goal of multicultural education is an education for freedom. . . . Multicultural education should help students to develop the knowledge, attitudes, and skills to participate in a democratic and free society. . . . Multicultural education promotes the freedom, abilities and skills to cross ethnic and cultural boundaries to participation in other cultures and groups,"* (Reissman, 1994: 3).

Artinya:

"Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis dalam berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain."

Masih menurut Banks, substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as education for freedom*) sekaligus sebagai penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antarsesama (*as inclusive and cementing movement*). Jadi, pendidikan multikultural bersifat anti-rasis, mendasar, penting (berguna) untuk semua siswa, pervasif (dapat me-

resap, menembus, dan merembes), untuk keadilan sosial serta merupakan sebuah proses dan pedagogi kritis.

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. Kedua, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan negara lain. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan, serta budaya yang kadang-kadang bertentangan dengan sebuah peristiwa, nilai, dan perilaku. Keempat, membuka pikiran ketika merespon isu. Kelima, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang (Gollnick dan Chinn, 1991: 6).

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut agar berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini.

- Pendidikan multikultural harus menawarkan keanekaragaman kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
- Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
- Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandangan kebudayaan yang berbeda-beda.
- Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
- Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pe-

mahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri (Mack, 1992: 1-4).

Salah satu ciri utama pendidikan multikultural adalah tidak adanya kebijakan dari lembaga pendidikan (sekolah) yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Pendidikan multikultural harus menumbuhkan toleransi di kalangan anak didik terhadap perbedaan budaya, misalnya menyangkut tata cara atau adat istiadat berpakaian, musik, makanan kesukaan; memberikan kebebasan bagi mereka dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh kesadaran mereka agar mau terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis (Romanowski, 2002: 2).

Bisa digarisbawahi bahwa nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena itu, toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif, bukan sikap yang spontan (*La tolerance est une position civique active, et non pas une attitude spontanee*, Savater). Sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar menginternalisasikannya (Ali, 2002:4). Toleransi harus dididikan, tidak cukup berhenti pada wacana. Keputusan majelis ulama, keputusan konsili, kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, dan kesepakatan hasil pertemuan tokoh agama yang menganjurkan toleransi tidak akan cukup efektif bila hanya berhenti di kertas dan bibir, tanpa dukungan pendidikan dalam arti luas.

Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih multicultural, pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh

pluralisme dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi serta dominasi sosial. Pada konteks ini, tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstra-kurikuler, dan peran guru menjadi multikultural. Menurut Gay's, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran yang mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas, bersifat komprehensif dan mencakup semua level pendidikan (Hidalgo, 2003: 51).

## 2. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan multikultural berpijak pada semangat dan kesadaran untuk saling menghargai perbedaan, kenyataan kemajemukan sosial serta menjauhi sikap diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih secara sungguh-sungguh dengan menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain (Suparno, 2003). Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan perlu memasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain dengan maksud agar siswa mengerti bahwa ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Jika memberi contoh tentang ketokohan seorang ilmuwan dan hasil penemuannya, dia perlu menampilkan sejumlah tokoh dengan latar belakang berbagai budaya dan jender. Dalam proses ini, seorang guru akan bisa menjelaskan kesamaan dan perbedaan antarbudaya sehingga akan membantu para siswa untuk lebih mengerti ten-

tang nilai-nilai budaya orang lain serta akan mau menerima dan menghargai secara positif. Pola sama bisa digunakan guru ketika mengajarkan etika sosial yang berkaitan dengan tata cara makan, berpakaian, dan cara hidup hendaknya bukan hanya dijelaskan dari sudut pandang budaya atau etnis tertentu, tetapi juga dijelaskan menurut sudut pandang budaya dan etnis orang lain.

Konsep keragaman budaya yang menjadi dasar dalam pendidikan multikultural diperkenalkan oleh pendidik di hadapan para siswa dengan menggunakan sebuah alat peraga visual berupa payung. Sebut saja payung itu bernama "payung multikultural (*the multicultural umbrella*) yang pada setiap ruas bagian luar payung ditulis berbagai etnis, ras, agama, budaya, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan/keadaan khusus, seperti anak-anak terlantar, orang-orang cacat, penderita AIDS dan lain-lain (Reissman, 1994:12).

Seorang pendidik bisa menggunakan "payung multikultural" dalam membantu anak didik untuk memahami keterlibatan banyak kelompok dan beragam keinginan yang muncul di masyarakat. Caranya, anak didik di kelas diberi waktu 5-10 menit untuk menyusun daftar anggota kelompoknya. Tiap-tiap kelompok membacakan apa yang tertulis di ruas payung yang dihadapinya. Setelah itu, kelompok lain disuruh untuk memberikan reaksi, refleksi dan tanggapan. Jika anak didik bisa menarik pemahaman terhadap payung multikultural tersebut, diyakini akan dapat menumbuhkan sensitifitas multikultural mereka. Sebuah kesadaran bahwa aneka ragam ras, etnis, agama, kebudayaan, dan kelompok kepentingan yang dihadapinya tidak akan

menghalangi mereka untuk hidup berdampingan secara damai, rukun, dan kohesif.

Atas dasar ini, maka proses pendidikan multikultural berorientasi pada siswa atau komunitas tertentu, yang memungkinkan guru memahami keyakinan serta nilai-nilai sosio-budaya siswa dalam konteks kebudayaan masyarakat yang berjalan pada saat dia merancang model pembelajaran yang akan digunakan. Para pendidik pada konteks ini disarankan menggunakan pendekatan antropologis untuk mengidentifikasi berbagai kelompok sosial-budaya, nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dan mempengaruhi proses kehidupan sehari-hari. Pendekatan antropologis ini akan membantu para pendidik dalam mengidentifikasi perumusan dan penerapan model pembelajaran yang tanggap budaya dan bisa membentuk sikap positif-apresiatif terhadap perbedaan etnik dan sosio-budaya di kelas, masyarakat, dan nasional (Rohidi, 2002:4).

Paradigma pendidikan multikultural bisa dilaksanakan oleh para pendidik dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif (*cooperative teaching strategies*). Strategi pembelajaran kooperatif dipilih karena ia diyakini akan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan etos kerja sama di antara para siswa. Sebuah proses pembelajaran dianggap menggunakan strategi pembelajaran kooperatif jika memiliki lima unsur. Pertama, adanya *positive interdependence* (saling ketergantungan positif). Anggota kelompok menjalankan peran sebagai pembahas sebuah topik diskusi, penanggap dan pendukung hingga mencapai konsensus. Kedua, adanya *face-to-face promotive interaction* (interaksi tatap muka yang membangun). Para siswa berdiskusi, mengajar dan menjelaskan kepada sis-

wa lain dengan cara membangun seperti memberikan dorongan dan saling membantu dalam belajar. Ketiga, adanya *individual accountability* (pertanggungjawaban secara individual). Dalam tahapan ini, para siswa dinilai secara individual dengan maksud untuk meyakinkan bahwa masing-masing anak telah bekerja sesuai bidang pekerjaan yang menjadi bidang tugasnya. Keempat, adanya *social skills* (ketrampilan sosial). Dalam konteks ini, para siswa berupaya mempelajari ketrampilan sosial yang diperlukan dalam menjalin kerja sama dengan yang lain, seperti kepemimpinan, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi dan keterampilan memajemen konflik. Kelima, adanya *groups process their effectiveness*, yang ditandai dengan kesediaan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kemajuan mereka dan saling memberikan masukan sehingga masing-masing bisa meningkatkan diri (Martin, *et al*, 2003: 18).

Strategi *cooperative learning* yang digunakan dalam pendidikan multikultural diasumsikan bisa mendorong anak untuk saling belajar tentang segi-segi positif dari temannya. Dengan cara ini, mereka akan terkondisikan dengan proses pembelajaran di mana seorang siswa belajar hidup bersama siswa lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami (Semiawan, 2003: 1).

Penerapan paradigma pendidikan multikultural dengan strategi *cooperative learning* diyakini dapat memupuk nilai-nilai baru (*co-creating new values*) pada diri anak didik yang berupa kesediaan untuk hidup rukun dengan sesama dalam suasana kemajemukan. Proses pembelajaran ini diakui akan dapat mengubah cara berpikir anak didik dari yang bersifat sempit dan

fanatis dengan membanggakan budaya mereka sendiri (*microculture*) menjadi demokratis, multikulturalis pluralis dan mampu menghargai budaya orang lain.

Pada akhirnya, bisa tidaknya wacana pendidikan multikulturalisme diterapkan dalam lembaga pendidikan tergantung pada ikhtiar kita bersama. Pada konteks ini, Depdiknas R.I agaknya sebagai pihak yang pantas ditunggu peran aktifnya. Setidaknya, Depdiknas R.I mau mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Pandangan multikulturalisme sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, sebagai mata pelajaran ekstra-kurikuler atau secara formal dibakukan menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antarsuku bangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan berbagai tempat lainnya. Penerapan pandangan multikulturalisme dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi upaya preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan munculnya konflik berdarah antarsuku bangsa. (Parsudi Suparlan, 2003: 1).

### 3. Pendekatan dalam Pendidikan Multikulturalisme

Pendidikan multikultural adalah sebuah pemikiran pendidikan yang mengakui keabsahan, kekuatan dan pentingnya keragaman etnis dan budaya dalam membentuk kehidupan individual, kelompok dan bangsa. Pendidikan multikultural merupakan pelembagaan filosofat pluralisme budaya dalam proses pendidikan, yang dalam praktek pengelolaan pendidikan didasarkan pada semangat menjunjung tinggi prinsip persamaan, saling menghargai, penerima-



an, pemahaman serta komitmen moral untuk keadilan sosial (Gay, 1994: 2).

Bank menjelaskan bahwa tipologi pendidikan multikultural dapat dikelompokkan dalam tiga jenis (Burnett, 1994:2-3). Pertama, program pendidikan multikultural berorientasi pada isi. Upaya yang paling pokok dalam orientasi ini adalah mengubah kurikulum dalam rangka mewujudkan tiga tujuan: (1) menyusun dan mengembangkan materi multikultural ke dalam seluruh materi pelajaran; (2) memasukkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda dalam kurikulum; dan (3) mengubah prinsip atau standar kurikulum dan mengembangkan paradigma baru dalam kurikulum.

Kedua, program pendidikan multikultural berorientasi siswa. Karena pendidikan multikultural sebagai sebuah upaya merefleksikan keanekaragaman sekolah, banyak program pendidikan multikultural dirancang dengan mengikuti perubahan kurikulum yang secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akademis dari berbagai kelompok siswa yang berbeda-beda, terutama dari kelompok minoritas. Ketika program kurikuler diupayakan untuk memperluas cakupan pengetahuan tentang perbedaan etnis, budaya dan kelompok gender, program berorientasi siswa dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik para siswa dari kelompok minoritas. Program pendidikan multikultural berorientasi siswa tidak disusun untuk mengubah kurikulum atau konteks sosial pendidikan, tetapi untuk membantu para siswa yang berbeda-beda secara budaya dan bahasa dalam melewati masa transisi pada arus besar pendidikan. Pelaksanaan program ini sering mempertimbangkan dan menggunakan latar belakang budaya dan bahasa siswa yang beragam.

Ketiga, program pendidikan multikultural berorientasi sosial. Program ini dilakukan untuk memperbaiki persekolahan, konteks budaya, dan politik persekolahan. Jadi, tujuan program ini adalah memperluas dampak peningkatan toleransi ras dan budaya, dan mengurangi bias ras dan budaya.

Pendidikan multikultural perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Sejauh ini, ada empat pendekatan dalam pendidikan multikultural yang dapat dipertimbangkan oleh pendidik dalam mengajarkan pendidikan multikultural. Pertama, pengajaran tentang eksistensi dan peranan berbagai kelompok budaya dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pendekatan tambahan, di mana pelajaran multikultural dan unit-unit kajian multikultural melengkapi kurikulum yang ada. Ketiga, pendekatan transformasi, di mana sifat dasar kurikulum dan pengajaran yang sudah berjalan diubah dengan merefleksikan pandangan dan pengalaman kebudayaan, etnik, ras dan kelompok sosial yang beragam. Keempat, pendekatan tindakan sosial dan pengambilan kebijakan, yang mengajarkan para siswa bagaimana menjelaskan nilai-nilai budaya dan etnis mereka serta menggunakan tindakan sosial politik untuk meningkatkan persamaan, kebebasan dan keadilan bagi setiap orang.

Sleeter dan Grandt telah mengkaji berbagai literatur tentang pendidikan multikultural untuk menentukan bagaimana bidang pendidikan multikultural dikonseptualisasikan. Setelah menganalisis, mereka menghasilkan empat pendekatan umum dalam pendidikan multikultural. Pertama, pengajaran kepada siswa yang berbeda-beda secara budaya untuk menyesuaikan dengan arus besar masyarakat. Kedua, pendekatan hubungan kemanusiaan yang menekan-

kan keanekaragaman masyarakat yang mau hidup bersama secara harmonis. Ketiga, pendekatan kajian kelompok tunggal, yang berkonsentrasi pada pengembangan kesadaran, penghargaan, penerimaan satu kelompok pada satu waktu. Keempat, memusatkan pada penghilangan prasangka, memberikan persamaan kesempatan dan keadilan sosial untuk semua kelompok dan mempengaruhi distribusi kekuasaan secara wajar terhadap kelompok budaya dan etnis. Berdasarkan hal ini, mereka menambahkan pendekatan Kelima, pendidikan dilaksanakan secara multikultural dan menyusun kembali masyarakat serta mengajarkan siswa menjadi pemikir kritis, analitis, dan pembaharu sosial yang berkomitmen untuk meredistribusikan kekuasaan dan sumber-sumber lain di antara kelompok yang berbeda-beda.

Pengajaran budaya yang berbeda-beda perlu berorientasi pada proses, bukan berorientasi kepada materi. Pusat perhatian dari pendekatan ini adalah menyusun hubungan pengajaran yang efektif dan dihubungkan dengan siswa yang berbeda-beda secara etnis, budaya, dan latar belakang ras sebagai dasar untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan hasil pendidikan. Guru, tenaga administrasi, pembimbing, dan para pengawas perlu mempelajari nilai-nilai dan pengalaman budaya dari kelompok kebudayaan yang berbeda-beda untuk menentukan bagaimana mereka bisa mempengaruhi sikap dan tindakan dalam situasi pembelajaran. Pemikiran baru yang didapatkan, kemudian digunakan untuk menentukan jenis-jenis perubahan yang diperlukan dalam proses pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan belajar secara proporsional bagi siswa yang berbeda-beda etnis sesuai dengan

jenis dan kualitas pendidikan yang diterima oleh umumnya para siswa.

Premis yang mendasari pendekatan pendidikan multikultural adalah adanya hubungan interaktif antara budaya dengan pengetahuan, pendidikan dan etnisitas, gaya pengajaran dengan kondisi kebudayaan. Jelasnya, konsep yang dibuat secara eksplisit dalam pengambilan kebijakan pendidikan ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap akses para siswa yang berbeda-beda secara budaya untuk menyamakan status pengetahuan mereka. Berbeda dengan pendekatan pengajaran pluralisme budaya yang menekankan pengembangan materi pelajaran dan rancangan kurikulum, pendekatan pengajaran kebudayaan yang berbeda-beda diberikan dalam pendidikan guru, pengembangan staf dan pengajaran di ruang kelas. Ide yang berada di belakang pendekatan pengajaran kebudayaan yang berbeda-beda adalah jika sikap, nilai dan pengetahuan guru tentang kebudayaan siswa yang berbeda-beda dikembangkan, kemudian diputuskan dan dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan mencerminkan perubahan. Dengan demikian, para guru akan dapat memberikan pengajaran yang secara budaya lebih relevan bagi para siswa yang secara etnis, ras, latar belakang sosial berbeda-beda.

Pendekatan pendidikan multikultural yang ketiga adalah memadukan isi dengan proses, atau sering dinamakan *infusion* (penanaman). Dalam praktiknya, pendekatan ini dimaksudkan sebagai penggunaan isi, pengalaman dan perspektif pluralisme budaya dalam pengajaran pengetahuan dan berbagai keterampilan lain (Arceneaux, 1992: 3). Materi-materi kebudayaan dan etnis menjadi konteks bagi siswa dalam mempraktekkan dan mendemonstrasi-

kan penguasaan keterampilan-keterampilan akademik secara lebih umum. Misalnya, cerita-cerita etnis, puisi, cerita dan dongeng digunakan dalam pengajaran berbagai keterampilan membaca seperti pemahaman, kosakata dan menarik makna. Pola-pola perpindahan etnik dan penduduk dari satu kawasan ke kawasan lain mungkin dapat digunakan untuk mengajarkan arah dan lokasi geografis. Kecenderungan pekerjaan menurut jenis kelamin dan etnis bisa digunakan para siswa untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan berbagai keterampilan matematika, seperti perbandingan, persentasi, proporsi dan probabilitas. Pemikiran kritis, pemecahan masalah dan keterampilan menganalisis nilai-nilai bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Pola ini digunakan untuk menilai masalah, peristiwa, dan situasi yang berhubungan erat dengan sejarah dan pengalaman kontemporer kelompok sosial dari berbagai etnis, seperti menyangkut gambaran dan pencitraan sebuah etnis di mass media, tindakan *affirmative*, eksploitasi ekonomi dan perlawanan politik. Pengetahuan yang dimiliki para guru dan para pimpinan sekolah tentang bagaimana kondisi budaya mempengaruhi situasi pembelajaran akan dapat digunakan dalam membuat keputusan tentang strategi pengajaran, penilaian prestasi, penilaian kebutuhan dan iklim pelajaran yang paling sesuai untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi para siswa yang memiliki kebudayaan berbeda-beda.

Implementasi pluralisme budaya dalam semua kegiatan pengajaran atau belajar sebagai cara dalam melaksanakan pendidikan multikultural perlu didasarkan pada empat premis pokok. Pertama, penggunaan khasanah keanekaragaman budaya untuk mencapai ha-

sil pelajaran bersama adalah cara paling baik untuk memberi kesempatan secara sama kepada siswa. Kedua, keanekaragaman budaya adalah ciri pembawaan atau sifat dari sebuah masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia. Oleh sebab itu, fungsi utama sekolah dalam mensosialisasikan budaya, etnis dan pluralisme budaya secara nasional harus dijadikan elemen utama dari proses pendidikan. Ketiga, kajian pluralisme budaya secara pedagogis menembus semua dimensi dari proses pendidikan. Dengan demikian, pluralisme budaya tidak diajarkan sebagai sesuatu yang terpisah atau mata pelajaran distinktif (mandiri), tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada sebagai semangat dan prinsip pembelajaran. Keempat, pendidikan multikultural yang efektif menuntut upaya komprehensif yang memadukan sikap, nilai, isi dan tindakan serta melibatkan semua aspek dari sistem pendidikan secara simultan.

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang menekankan dominasi sebuah budaya, penuh prasangka dan bersifat diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan bersifat terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka, namun menuntut transformasi menyeluruh yang mencakup transformasi diri, sekolah dan proses belajar mengajar serta masyarakat.

Model pendidikan multikultural di negara lain, seperti di Inggris, Australia dan Kanada menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural sebatas pada penambahan informasi tentang keragaman budaya yang ada. Pe-

nambahan informasi tentang keragaman budaya dilakukan dengan cara merevisi materi pembelajaran, termasuk memperbaiki buku-buku teks. Dalam konteks ini, sifat penekanan pendidikan multikultural yang berjalan masih sebatas pada dimensi kognitif.

Model pendidikan multikultural yang lain adalah mereformasi sistem pembelajaran, bukan merevisi materi pembelajaran. Pada konteks ini, dilakukan *affirmative action* (tindakan khusus) misalnya dengan memfasilitasi pembauran dan interaksi antarsiswa baru dari berbagai latar belakang budaya serta menyusun berbagai program kelas lintas etnis.

Jika mengaca pada konteks sosial Indonesia yang majemuk maka model pendidikan multikultural yang digunakan bisa memadukan dua model pembelajaran multikultural di atas. Model penambahan informasi dilakukan dengan menyusun teks sejarah baru yang mengakomodasikan kontribusi dan partisipasi warga dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia secara lebih fair. Sementara itu, model reformasi sistem pembelajaran antara lain dilakukan dengan menciptakan sistem pembelajaran yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai toleransi, kepekaan sosial dan mengurangi prasangka antar kelompok.

## B. Penutup

Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh dengan cara membongkar kekurangan, kegagalan dan praktek-praktek diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kesamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multikul-

tural menjadi sebuah komitmen untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memberi kemungkinan bagi setiap siswa dalam mengembangkan potensi diri secara maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif serta memupuk kepekaan sosial tinggi dalam pergaulan lokal, nasional dan global (Budianta, 2003: 98).

Pembelajaran yang berparadigma multikultural memerlukan dukungan system budaya yang tidak monolitik, kaku, penuh prasangka/bias, hegemonik dan etnosentris. Norma yang berlaku dalam prosedur pengambilan keputusan dan pelaksanaan pendidikan harus bersifat heterogen dan pluralis, tidak hegemoni atau homogen. Menurut Gay's, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum disusun berdasarkan sejarah budaya bangsa yang beragam, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, pembelajaran bersifat kontekstual, bersifat menyerap keragaman, dapat diterapkan secara luas, bersifat komprehensif, dan semua level pendidikan mencerminkan semangat multikulturalisme (Hidalgo, 2003: 51).

Sebuah praktek pendidikan dianggap berparadigma multikulturalisme jika memiliki ciri-ciri dasar sebagai berikut.

1. Berupaya untuk mewujudkan pemahaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan masyarakat..
2. Mengkoreksi dan merehabilitasi kesalahan yang telah dilakukan sekolah dalam mendidik anak-anak yang berbeda secara budaya, khususnya terhadap mereka dari golongan miskin dan minoritas.
3. Ada hubungan erat antara proses, struktur dan substansi, tindakan dan

refleksi, pengetahuan dan nilai, pemikiran dan metodologi dan antara sarana pendidikan dengan tujuan pendidikan.

4. Dimaksudkan untuk mewujudkan persamaan dalam kesempatan pendidikan bagi siswa yang berlatar belakang berbeda-beda.
5. Ada sebuah titik temu antara warisan budaya, pengalaman, sudut pandang dan sumbangan yang beranekaragam (Gay, 1994: 19).

#### Daftar Pustaka

- Ali, M. 26 April 2002. "Pendidikan Pluralis-Multikultural" *KOMPAS*, (Jakarta, PT. Kompas).
- Arceneaux, C, J. 1992. "Multicultural Education and Invitational Theory: A Symbiosis," *Journal of Invitational Theory and Practice Online*, (North Carolina: The International Alliance for Invitational Education (IAIE), Vol. 1, No. 2). <http://www.invitationaleducation.net/publications/journal/v12p87.htm>.
- Banks, J. A. 1997. "Multicultural education: Characteristics and goals" In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.) *Multicultural education: Issues and perspectives*. Boston, Allyn and Bacon.
- Budianta, M. 2003. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum" dalam *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta: INCIS dan CSSP\_USAID).
- Chirzin, C. M. 26 Juli 1995. "Pendidikan Global untuk Masa Depan Bersama", *Republika*. (Jakarta).
- Edyar, B. 31 Maret 2003. "R Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, (Jakarta, PT. Kompas).
- Gary, B. 1994. "Varientes of Multicultural; An Introduction" dalam *Ericfacility.net* (New York: Eric Clearinghouse on Urban Education). [http://www.ericfacility.net/databases/ERIC\\_Digests-/ed372146.html](http://www.ericfacility.net/databases/ERIC_Digests-/ed372146.html).
- Gay, G. 1994. "A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education" dalam *Urban Education Monograph Series*, (Washington, NCREL's Urban Education Program).
- Gollnick, D. M dan Philip, C. C. 1991. *Multicultural Education for Exceptional Children*. E,(IC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA).
- Gorski, P. 2003. "Multicultural Philosophy Series, Part 1:A Brief History of Multicultural Education" dalam *The McGraw Hil Education Papers online*. The McGraw-Hill Companies.
- Hidalgo, F. 2003. *Multicultural Education Landscape For Reform In Twenty First Century*. New Mexico: New Mexico State University.
- Mack, C., Jr. Juli-Agustus 1992. "Mistaken Identity and Issues in Multicultural Education." *Updating School Board Policies* 23.

- Martin, D, J, *et.all.* 2003. "Issues of Feminism and Multicultural Education for Educational Technology" dalam *Instructional Technology online*, (Athens, The University of Georgia). <http://itech1-coe.uga.edu/itforum/paper38/-paper38.html>.
- McCarthy, C. 1994. "Multicultural Discourses and Curriculum Reform: A Critical Perspective" dalam *Journal Winter Online*. Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44.
- Reissman, R. 1994. "The Evolving Multicultural Classroom" dalam *ASCD Publication*. New York: ASCD.
- Rohendi, R. T. 23 September 2002. "Pendidikan Seni Multikultural" dalam *KOMPAS*, (Jakarta, PT Kompas).
- Romanowski, J. 2002. "Exploring My Practicum Community A Critical Analysis of Multicultural Education Initiatives" in the *Winning Paper*, (Nipissing University).
- Semiawan, C. 14 September 2003. "Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM melalui Pendidikan Multikultural" dalam *Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakkan HAM*, (Ditjen HAM).
- Soekarnoputri, M. 8 Juli 2003. *UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lembaran Negara.
- Soenarjo, R. H. A. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sirry, M. A. 1 Mei 2003. "Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme", dalam *KOMPAS*. Jakarta: PT Kompas.
- Subagyo, A. 28 Desember 2001. "Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global", dalam *KOMPAS*. Jakarta: PT. Kompas.
- Suparlan, P. 2003. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Artikel CMDD*, (Jakarta, CMDD Online). [http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel\\_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm).
- Suparno, P. 7 Januari 2003. "Pendidikan Multikultural" dalam *Kompas*. Jakarta: PT Kompas.
- Watkins, W, H. 1994. "Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry" dalam *Journal Winter Online*. Illinois: University of Illinois, Number 1 Volume 44.